



Program KMS Belum Ampuh

Pemkot memiliki kartu menuju sejahtera (KMS). Selain ini anggaran juga sudah dijamin melalui APBD dan APBN. Namun, masih tinggi angka kemiskinannya

YOGYA, TRIBUN - Kalangan legislatif berinisiatif untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kota Yogyakarta terkait angka kemiskinan yang masih tinggi. Selain itu, dewan juga akan mengevaluasi sejauh mana program pengentasan kemiskinan di kota ini berjalan dengan efektif.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah warga miskin mencapai 8,75 persen. Hal ini lebih tinggi dari target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016 yang menargetkan angka kemiskinan mencapai 8,4 persen.

"Sejauh ini, Pemkot telah memiliki kartu menuju sejahtera (KMS) yang setiap tahun ada pembaharuan data dan verifikasi. Selain ini anggaran juga sudah dijamin melalui APBD dan APBN. Namun,

masih tinggi angka kemiskinannya," kata Dian Novitasari, anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Rabu (8/2).

Evaluasi

Menurutnya, dengan beberapa program pengentasan kemiskinan ini, namun belum mampu menekan angka kemiskinan. Maka, program ini harus dievaluasi secara total. Selain evaluasi program, peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) patut juga untuk dievaluasi.

"Ekonomi kota mengalami peningkatan, tapi jika warga miskin tidak terberdayakan berarti ada yang kurang optimal," ulas Dian.

Di sisi lain, indikator kemiskinan dinilai perlu dikaji ulang. Termasuk, kalangan dewan juga akan menelusuri beberapa penyebab kemiskinan itu. Apakah karena adanya faktor pengangguran atau penyebab yang lainnya.

Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Yogya, Dian Anindati selisih 0,35 persen dari target

Program KMS Belum Ampuh

• Sambungan Hal 13

RPJMD ini masih tinggi. Dia juga mengaku heran dengan angka kemiskinan di Kota Yogya yang masih cukup tinggi ini.

"Warga yang menempati rumah tidak layak huni semakin berkurang. Alcan tetapi, jumlah warga yang masih berada dalam garis kemiskinan seakan tidak

berkurang. Maka, perlu ditelusuri penyebabnya," katanya.

Panggil Dinsos

Pihaknya pun berencana untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk dimintai keterangan mengenai program penanggulangan kemiskinan. Pasalnya, dinas terkait ini menyelenggarakan beberapa program perlindungan sosial yang tujuannya adalah untuk menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Yogya.

"Kami akan klarifikasi dan

kalau indikatornya sudah jelas, unggal program di tiap instansi disinergikan," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kota Yogya Hadi Muhtar menyatakan telah merencanakan untuk mengubah parameter baru untuk menentukan penerima KMS. Nantinya, untuk penerima KMS akan mendapat kriteria baru, sehingga akan memperkecil warga yang memaksakan untuk masuk dalam daftar penerima KMS.

"Usulan kriteria baru ini, nan-

tinya akan disampaikan pada Wali Kota definitif setelah ditetapkan tahun ini," paparnya.

Adapun indikator yang saat ini dipakai ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Jogja Nomor 244/KEP/2012. Dalam keputusan tersebut ditetapkan tujuh aspek penilaian yang meliputi pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kendaraan, pendidikan dan sosial. Dari tujuh aspek tersebut kemudian ditetapkan 17 parameter penilaian. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005